

Urgensi Pengembangan Wisata dalam Perencanaan Wilayah di Pulau Muna Provinsi Sulawesi Tenggara



The urgency of tourism development in the planning of Muna Island Region, Southeast Sulawesi

Fadhil Surur^{1✉}, Zulhinas Nyilam Cahya², Malikuddin Surgani Wahid³

¹Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar

²Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara

³Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan

Info Artikel:

Diterima: 16 Juni 2019

Disetujui: 7 Agustus 2019

Dipublikasi: 5 November 2019

Keyword:

Wisata; Pulau; Ekowisata pantai

Korespondensi:

Fadhil Surur

Teknik Perencanaan Wilayah dan

Kota, Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar

Email: [fadhi.surur@uin-](mailto:fadhi.surur@uin-alauddin.ac.id)

[alauddin.ac.id](mailto:fadhi.surur@uin-alauddin.ac.id)

ABSTRAK. Percepatan pemanfaatan berbagai potensi setiap daerah sangat perlu dilakukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Terdapat tiga kabupaten di Pulau Muna, Sulawesi tenggara yang memiliki potensi karena kekayaan pesisir dan keberadaan pulau-pulau kecilnya akan tetapi pengelolaannya masih dilakukan secara parsial. Akselerasi perlu dilakukan pada keterpaduan pengelolaan objek wisata di pulau Muna untuk mewujudkan kemandirian ketiga daerah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kesamaan kebijakan pengembangan wisata dan potensi wisata unggulan serta menyusun arah kebijakan pengembangan wisata melalui pendekatan kekhasan wilayah geografis Pulau Muna. Penelitian dilakukan melalui survey lapangan dan penelesuruan dokumen perencanaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan mix method. Analisis yang digunakan meliputi analisis konten, skoring dan deksriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan wisata di Pulau Muna telah diarahkan pada RTRW Kabupaten Muna dan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pengembangan ekowisata, sehingga Kabupaten Muna Barat dan Buton Tengah dapat mensinergikan konsep ekowisata tersebut dalam rencana tata ruangnya. Potensi wisata dapat diklasifikasikan pada kategori rendah dan sedang. Kategori rendah berada pada objek wisata Pulau Gala Kecil, sedangkan tiga belas objek wisata lainnya termasuk dalam kategori potensi sedang. Urgensi pengembangan objek wisata di Pulau Muna perlu mengedepankan konsep pengembangan ekowisata berbasis pesisir dan pulau-pulau kecil melalui percepatan pengelolaan objek wisata kategori sedang.

ABSTRACT. Accelerating the utilization of various potentials in each region is very necessary to make a region become independent. There are three districts in Muna Island, Southeast Sulawesi that have potential because of their coastal resources and the existence of small islands, but the management is still done partially. Acceleration needs to be done on the integration of tourist attractions management on Muna island to make the three regions become independent. The aim of this study was to identify the similarities of tourism development policies and superior potential of tourism and to arrange the direction of tourism development policy through the approach to the unique geographical area of Muna Island. The research was carried out through field surveys and search of planning documents. The data obtained were analyzed using a mixed method approach. The analysis used included content analysis, scoring and descriptive analysis. The results showed that the tourism development policy on Muna Island was directed to the Neighborhood or Citizens Association of Muna Regency and the Neighborhood or Citizens Association of Southeast Sulawesi Province as ecotourism development so that West Muna and Central Buton Districts could synergize the concept of ecotourism in their spatial plans. The low category is on the Small Gala Island tourist attraction, while the other thirteen tourist attractions are classified in the medium category. The urgency of developing tourism attractions on Muna Island has to prioritize the concept of developing coastal and small island-based ecotourism through accelerating the management of medium category of tourist attractions.



Copyright© November 2019 F. Surur, Z. N. Cahya, & M. S. Wahid

Under Licence a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

1. Pendahuluan

Seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan, pelibatan masyarakat dan peningkatan daya saing kegiatan

wisata, maka proses perkembangan pariwisata didorong dalam rangka mewujudkan *sustainable tourism* atau pariwisata berkelanjutan. Konsep ini merupakan langkah

untuk mengelola semua sumber daya agar dapat memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi, tanpa harus mengorbankan integritas budaya, proses-proses ekologi yang mendasar, keragaman hayati, dan unsur-unsur pendukung kehidupan lainnya (Dias, 2009). Secara kewilayahan, pengembangan pariwisata di Indonesia berpedoman pada pengembangan karakter multisektor dan lintas regional, sehingga diharapkan secara konkret mampu mendorong pembangunan infrastruktur, sekaligus memajukan ekonomi kreatif sebagai penopang arus investasi dan pengembangan wilayah. Hal tersebut sejalan dengan usaha pemerintah dalam mewujudkan penataan ruang dan perencanaan wilayah yang berkelanjutan.

Reorientasi pendekatan pembangunan saat ini memerlukan diterapkannya pendekatan pembangunan wilayah yang berbasis sumberdaya domestik. Sumberdaya domestik yang dimaksud mencakup sumberdaya dalam pengertian yang luas mencakup sumberdaya fisik-alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, dan sumberdaya sosial (Rustiadi, 2001). Hubungan pariwisata dengan pengembangan wilayah ditandai dengan berbagai upaya pemerintah daerah dalam mendorong potensi pariwisata lokal dengan pendekatan ketrpaduan kawasan. Pemerintah Kabupaten Nias mengembangkan kawasan Soziana (Somi – Bozihona – Onolimbu – Nalawo) sebagai kawasan wisata kepulauan yang terpadu (Lase, Sihombing, & Tamrin, 2018). Sedangkan Pemerintah Kabupaten Ciamis menetapkan wilayah Pengembangan Pariwisata Priangan, yang dibagi dalam 6 (enam) Satuan Kawasan Wisata (SKW), yakni SKW Panjalu, Bojong Galuh, SKW Karang Nini, SKW Pangandaran, SKW Parigi dan SKW Batu Karas (Hidayat, 2011). Potensi pariwisata juga berkembang pesat di Kabupaten Lombok Timur seiring dengan kebijakan perencanaan wilayah, dimana sektor pendukung pariwisata diprediksi dapat menarik sektor lainnya untuk ikut berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi PDRB kabupaten (Utami, 2016).

Berbagai potensi yang dimiliki setiap daerah perlu dilakukan percepatan pemanfaatan dalam mewujudkan kemandirian daerah tanpa harus bergantung dengan daerah lain. Perwujudan kemandirian daerah saat ini dapat ditandai dengan pengembangan potensi sumberdaya pariwisata, terutama dalam menghadapi persaingan pasar wisata. Terdapat tiga faktor yang dapat menentukan keberhasilan pengembangan pariwisata sebagai suatu industri, ketiga faktor tersebut diantaranya: tersedianya objek dan daya tarik wisata (*attraction*), kemudahan dalam mencapai daerah tujuan wisata baik secara geografis atau kecepatan teknis, serta tersedianya sarana transportasi ke tujuan tersebut (*accessibility*) dan tersedianya fasilitas-fasilitas seperti tempat penginapan, restoran, hiburan serta komunikasi (Yotie, 2008).

Kebijakan pariwisata memberikan filsafat dasar untuk pembangunan dan menentukan arah pengembangan pariwisata di destinasi tersebut untuk masa depan. Sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Dalam pelaksanaan pengembangan, perencanaan merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan (Hidayat, 2011). Dalam perencanaannya pengembangan daya tarik wisata harus memperhatikan lima tahap proses perencanaan pariwisata yaitu melakukan inventarisasi mengenai semua fasilitas yang tersedia dan potensi yang dimiliki, menaksir pasaran pariwisata dan mencoba melakukan proyeksi arus kedatangan wisatawan pada masa yang akan datang,

memperhatikan di mana terdapat permintaan yang lebih besar dari pada persediaan atau penawaran, melakukan penelitian kemungkinan perlunya penanaman modal baik negeri maupun asing, melakukan perlindungan terhadap kekayaan alam yang dimiliki dan memelihara warisan budaya bangsa serta adat istiadat suatu bangsa yang ada (Abdillah, 2016). Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan pembangunan yang berdimensi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup yang memiliki keadilan tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi generasi yang akan datang, sehingga pariwisata harus dipandang sebagai suatu sistem yang memiliki berbagai komponen yang berinteraksi dan saling mempengaruhi (Suardana, 2011).

Jazirah Pulau Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kekayaan potensi pariwisata antara lain Pantai Meleura, Pulau Towea, Pantai Walengkabola, Pantai Mutiara, Pantai Wantopi, Pantai Katembe, dan Permandian Maobu. Sebagian besar objek wisata tersebut memiliki pangsa pasar yang luas. Secara administratif Pulau Muna termasuk dalam tiga wilayah administratif yang berbeda, yaitu Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton Tengah. Kesamaan karakter geografis, adat dan sosial budaya masyarakatnya menjadi modal utama dalam mewujudkan pengembangan pariwisata. Pengembangan wisata di Pulau Muna menghadapi berbagai macam tantangan, salah satunya kurangnya keterpaduan kebijakan pemerintah dalam menyamakan arah kebijakan kepariwisataan.

Secara teoritis pengembangan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil memerlukan dukungan dan kerjasama dari pemerintah pusat. Kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwujudkan dengan menyiapkan rencana tata ruang wilayah pesisir secara bersama sangat menguntungkan bagi masyarakat wilayah pesisir. Pemerintah Pusat perlu menekankan adanya kebutuhan untuk melibatkan pihak-pihak lain, misalnya masyarakat dan organisasi yang terkait (Kusriyaningsih, 2016). Sejalan dengan hal tersebut, tulisan ini berfokus pada pembahasan tentang pengembangan kepariwisataan di Pulau Muna dengan tujuan mengidentifikasi kesamaan kebijakan pengembangan wisata, mengidentifikasi potensi wisata unggulan di Pulau Muna, serta menyusun arah kebijakan pengembangan wisata dengan pendekatan kekhasan wilayah geografis Pulau Muna.

2. Metode Penelitian

2.1. Lokasi dan Waktu

Penelitian dilakukan di Pulau Muna pada 3 wilayah administratif yaitu Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara (Gambar 1). Penelitian dilakukan pada tahun 2018 (Pengamatan dan pengambilan data).

2.2. Pengumpulan Data

Data diperoleh dari data observasi dilapangan, data instansional (hasil kunjungan pada instansi terkait) serta data kepustakaan melalui literatur yang terkait dengan studi yang akan dilakukan. Jenis data utama yang digunakan mencakup kondisi eksisting internal dan eksternal seluruh objek daya tarik wisata, sebaran objek wisata, dokumen perencanaan yang mencakup peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah pada 3 kabupaten yang menjadi fokus kajian serta dokumen perencanaan di tingkat provinsi berupa dokumen Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara.

2.3. Analisis Data

2.3.1. Analisis konten

Analisis konten digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap konten atau muatan arahan kebijakan pemerintah daerah lokasi penelitian (Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Buton Tengah) dalam mengembangkan objek wisata di wilayah masing-masing. Pendekatan yang digunakan dengan

menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Analisis didesain untuk mengungkap makna simbolik yang tersamar, dimana peneliti mengungkap pesan atau kandungan makna dan nilai-nilai yang terdapat dalam buku-buku atau media lain yang menjadi sumber data penelitian (Arikunto, 2006). Pada dasarnya analisis konten adalah sebuah teknik penelitian yang akan membuat beragam inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematis dan objektif terhadap

Tabel 1. Klasifikasi Potensi Internal

| Potensi internal | Variabel | Kriteria | Skor |
|--|---|---|------|
| Kualitas objek wisata | Daya tarik utama objek wisata | Objek sebagai penangkap wisatawan | 1 |
| | | Objek sebagai penahan wisatawan | 2 |
| | Kekuatan interaksi komponen objek wisata | Kombinasi alami/buatan mampu mempertinggi kualitas objek | 1 |
| | | Kombinasi alami /buatan tidak mempertinggi kualitas objek | 2 |
| | Kegiatan wisata di lokasi wisata | Hanya kegiatan pasif (menikmati yang sudah ada) | 1 |
| | | Kegiatan aktif (berinteraksi dengan objek) | 2 |
| Kondisi objek wisata | Kondisi objek wisata secara langsung | Objek mengalami kerusakan | 1 |
| | | Objek sedikit mengalami kerusakan | 2 |
| | | Objek belum mengalami kerusakan | 3 |
| | Kebersihan objek wisata | Kurang bersih dan tidak terawat | 1 |
| Bersih dan terawat | | 2 | |
| Potensi eksternal | Variabel | Kriteria | Skor |
| Aksesibilitas | Waktu tempuh | > 60 menit | 1 |
| | | 30-60 menit | 2 |
| | | < 30 menit | 3 |
| | Ketersediaan angkutan umum menuju lokasi | Belum ada | 1 |
| | | Tersedia namun tidak regular | 2 |
| | | Tersedia dan regular | 3 |
| Prasarana jalan menuju lokasi objek wisata | Belum tersedia prasarana jalan | 1 | |
| | Tersedia namun kondisi kurang baik | 2 | |
| | Tersedia dan kondisi baik | 3 | |
| Fasilitas penunjang objek | Ketersediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan fisik wisatawan | Belum tersedia | 1 |
| | | Tersedia 1-2 jenis fasilitas | 2 |
| | | Tersedia lebih dari 2 fasilitas | 3 |
| | Ketersediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan sosial wisatawan | Belum tersedia | 1 |
| Tersedia 1-2 jenis fasilitas | | 2 | |
| Fasilitas pelengkap | Fasilitas terdiri dari berupa tempat parkir dan toilet/WC | Belum tersedia | 1 |
| | | Tersedia 1-2 jenis fasilitas | 2 |
| | | Tersedia lebih dari 2 fasilitas | 3 |
| Dukungan pengembang objek | Keterkaitan antar objek | Objek berdiri sendiri | 1 |
| | | Objek mendapat dukungan objek lain | 2 |
| | Ketersediaan lahan | Luas lahan untuk pengembangan terbatas | 1 |
| | | Luas lahan untuk pengembangan cukup | 2 |
| | Dukungan paket wisata | Objek wisata tidak termasuk dalam agenda paket wisata | 1 |
| | | Objek wisata termasuk dalam agenda paket wisata | 2 |
| Promosi objek wisata | Belum di promosikan | 1 | |
| | Sudah di promosikan | 2 | |
| Pendukung | Variabel | Kriteria | Skor |
| Kemampuan fisik wilayah sekitar objek wisata | Topografi | Topografi terjal (>30%) | 1 |
| | | Topografi datar (<30 %) | 2 |
| | Iklim | Iklim terlalu dingin/terlalu panas | 1 |
| | | Iklim sedang (20 °C -32 °C) | 2 |
| | Hidrologi | Tidak ada tubuh air di permukaan tanah | 1 |
| | | Ada tubuh air di permukaan tanah | 2 |
| | Biosfer | Tidak ada tumbuhan atau hewan khas | 1 |
| | | Ada tumbuhan atau hewan khas | 2 |

karakteristik yang bersifat khusus di dalam naskah atau teks (Ismawati, Anggani, & Narimati, 2011). Analisis konten ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis komunikasi yang tampak (*manifest*), dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel dan dapat direplikasi (Ahmad, 2018).

2.3.2. Analisis skoring

Analisis skoring digunakan untuk memberikan skor terhadap variabel potensi internal dan eksternal objek wisata berdasarkan kriteria yang dinilai serta potensi fisik pendukung (Tabel 1). Potensi terdiri dari beberapa variabel sedangkan variabel terdiri dari beberapa kriteria.

Potensi internal terdiri dari kualitas dan kondisi objek wisata, potensi eksternal terdiri dari aksesibilitas, fasilitas penunjang objek, fasilitas pelengkap, dukungan pengembangan objek, sedangkan potensi fisik dukungan mencakup kemampuan fisik wilayah sekitar objek. Seluruh objek wisata kemudian dinilai dengan menggunakan variabel tersebut. Nilai skor baik 1 sampai 2 maupun 1 sampai 3 pada masing-masing variabel potensi objek wisata merupakan bentuk tingkatan kualitas dan variabel yang dikuantitatifkan (Sunarwan, 2012).

Klasifikasi dilakukan dengan cara jumlah skor total tertinggi yang mungkin terjadi (apabila suatu objek wisata mempunyai skor maksimal dari masing-masing variabel) dikurangi jumlah skor terendah yang mungkin terjadi (apabila suatu objek wisata mempunyai skor minimal dari masing-masing variabel) sehingga akan diperoleh suatu interval nilai. Semua nilai skor yang diperoleh berdasarkan pada variabel dan kriteria penilaian objek wisata yang telah disusun. Berdasarkan interval nilai tersebut dibuat 3 (tiga) klasifikasi yaitu

- Kelas potensi tinggi nilai total skor objek wisata >40
- Kelas potensi sedang nilai total skor objek wisata 30-40
- Kelas potensi rendah nilai total skor objek wisata <30.

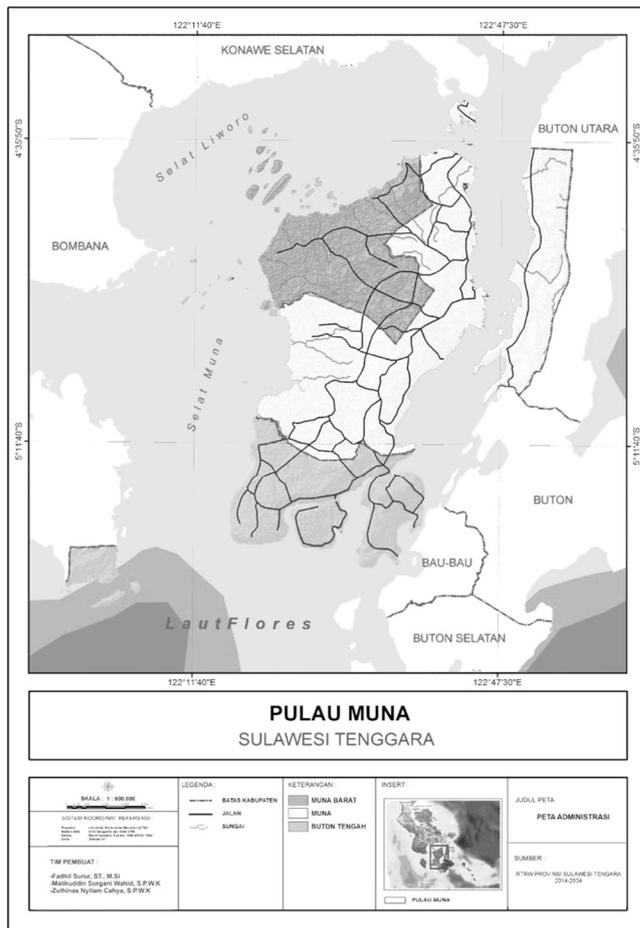
3. Kajian Pustaka

3.1. Sistem Pariwisata

Pariwisata merupakan suatu aktivitas yang kompleks yang dapat dipandang sebagai suatu sistem yang besar, yang mempunyai berbagai komponen seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial, budaya dan seterusnya. Melihat pariwisata sebagai sebuah sistem, berarti analisis mengenai berbagai aspek kepariwisataan tidak bisa dilepaskan dari subsistem yang lain, seperti politik, sosial ekonomi, budaya dan seterusnya, dalam hubungan saling ketergantungan dan saling terkait (*interconnectedness*). Sebagai sebuah sistem, antar komponen dalam sistem tersebut terjadi hubungan interdependensi, yang berarti bahwa perubahan pada salah satu subsistem akan menyebabkan juga terjadinya perubahan pada subsistem yang lainnya, sampai akhirnya kembali ditemukan harmoni yang baru. Pariwisata adalah sistem dari berbagai elemen yang tersusun seperti sarang laba-laba (Lokantara & Rafii, 2017).

Dalam sistem pariwisata, ada banyak aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem. Aktor tersebut adalah insan-insan pariwisata yang ada pada berbagai sektor. Secara umum, insan pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu: (1) masyarakat, (2) swasta, dan (3) pemerintah. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat umum yang ada pada destinasi, sebagai pemilik sah dari berbagai sumber daya yang merupakan modal pariwisata seperti kebudayaan. Dimasukkan kedalam kelompok masyarakat ini juga tokoh-tokoh masyarakat, intelektual,

LSM, dan media masa. Selanjutnya dalam kelompok swasta adalah asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha, sedangkan kelompok pemerintah adalah pada berbagai wilayah administrasi, mulai dari pemerintah pusat, negara bagian, provinsi, kabupaten, dan seterusnya (Lokantara & Rafii, 2017).



Gambar 1. Peta wilayah Pulau Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.

3.2. Pengembangan Pariwisata

Berkembangnya sektor pariwisata diharapkan dapat meminimalisir kantong-kantong kemiskinan terutama di daerah-daerah yang potensial untuk dijadikan kawasan wisata. Masyarakat seharusnya merasakan efek pariwisata dalam kesehariannya dan sadar bahwa pariwisata bukan hanya milik segelintir orang. Putra (2008) menyatakan desa wisata pada dasarnya mempunyai dua komponen dasar yaitu akomodasi dan atraksi. Dalam konsep ini akomodasi diartikan sebagai tempat tinggal penduduk yang disewakan kepada wisatawan dan selanjutnya atraksi merupakan wujud keseharian penduduk desa serta *setting* fisik desa yang unik. Pengembangan wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Lokantara & Rafii, 2017).

Wisata alam merupakan kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi alam untuk menikmati keindahan alam baik yang masih alami atau

sudah ada usaha budidaya, agar ada daya tarik wisata ke tempat tersebut. Wisata alam digunakan sebagai penyeimbang hidup setelah melakukan aktivitas yang sangat padat, dan suasana keramaian kota. Sehingga dengan melakukan wisata alam tubuh dan pikiran kita menjadi segar kembali dan bisa bekerja dengan lebih kreatif lagi karena dengan wisata alam memungkinkan kita memperoleh kesenangan jasmani dan rohani. Dalam melakukan wisata alam kita harus melestarikan area yang masih alami, memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya masyarakat setempat sehingga bias menjadi Desa wisata, agar desa tersebut memiliki potensi wisata yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti alat transportasi atau penginapan. Terpeliharanya nilai-nilai tradisional di suatu desa merupakan salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk tidak hanya berkunjung namun juga tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama di desa tersebut. Tidak diragukan lagi hal ini akan menunjang proses *take and give* dari sisi budaya dan ekonomi (Putra, 2008).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Gambaran umum Pulau Muna

Pulau Muna adalah sebuah pulau yang terletak di jazirah ujung pulau Sulawesi bagian Tenggara Sulawesi Tenggara dengan luas ±2.889 km². Pulau ini terletak pada selatan garis Khatulistiwa pada garis lintang 4°06-5.15° LS dan garis Bujur 120.00°–123.24° BT. Daratan pulau umumnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata kurang dari 100 meter di atas permukaan laut. Pulau Muna pada umumnya beriklim tropis dengan suhu rata-rata antara 25 °C–27 °C. Musim hujan terjadi antara bulan Nopember dan mulai Maret, di mana pada bulan tersebut angin bertiup dari Benua Asia dan Samudera Pasifik mengandung banyak uap air yang menyebabkan terjadinya hujan di wilayah Indonesia, sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan Mei dan bulan Oktober (BPS, 2018).

4.2. Potensi pengembangan wisata

Kabupaten Muna memiliki tiga kawasan destinasi unggulan yang potensi pariwisatanya dapat dikembangkan yaitu di Kecamatan Loghia yang terdiri dari Danau Napabale, Pantai Meleura, dan Puncak Wakila, di Kecamatan Tongkuno

yang menyajikan Pantai Pasir Putih Walengkabola, dan di Kecamatan Towea ada Pulau Towea.

Sedangkan dua kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Buton Tengah juga memiliki potensi pariwisata yang cukup potensial untuk dikembangkan, diantaranya Pantai Katembe di Kecamatan Lakudo, Pantai Wantopi dan Permandian Maobu di Kecamatan Mawasangka Timur, dan Pantai Mutiara di Mawasangka. Potensi pariwisata Kabupaten Muna Barat yang dikembangkan mencakup wisata yaitu Pulau Indo, Pantai Pajala dan Pulau Gala Kecil dan wisata alam yaitu Permandian Matakidi dan Permandian Wakante. Situs-situs wisata tersebut mempunyai prospek untuk dipublikasikan secara luas sebagai objek wisata unggulan.

Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Buton tengah sebagai wilayah administratif baru tengah mengembangkan objek wisata tersebut sebagai objek wisata unggulan di tingkat kabupaten. Berdasarkan hasil penelitian obyek wisata di Pulau Muna yang didasarkan pada penilaian metode teknik skoring terhadap potensi internal, potensi eksternal dan potensi fisik pendukung obyek yang kemudian dibuat potensi gabungan dan kemudian menjadi satu.

Penilaian potensi internal terdiri dari kualitas objek wisata (variabel daya tarik utama, kekuatan interaksi komponen dan kegiatan wisata) sedangkan kondisi objek wisata (variabel kondisi objek wisata secara langsung dan kebersihan objek wisata) memiliki rata-rata skor sedang. Tiga objek wisata memiliki potensi internal yang tinggi yaitu Danau Napabale, Pantai Meleura dan Pulau Mutiara dengan skor masing-masing 10.

Penilaian potensi eksternal terdiri dari aksesibilitas (waktu tempuh, ketersediaan angkutan umum menuju lokasi dan prasarana jalan), fasilitas pendukung (fasilitas sosial dan fasilitas fisik), fasilitas pelengkap, serta dukungan pengembangan objek (keterkaitan antar objek, lahan, dukungan paket wisata dan promosi objek wisata) memiliki rata-rata skor sedang. Hal tersebut berarti sebagian besar objek wisata di lokasi kajian belum maksimal dukungan potensi eksternalnya. Beberapa objek yang memiliki nilai potensi eksternal yang tinggi antara lain Wakante, Pulau Indo, Puncak Wakila, Danau Napabale, Maleura dan Katembe. Sedangkan penilaian potensi fisik dengan variabel topografi, iklim, hidrologi dan biosfer memiliki nilai 14% dengan skor tinggi yaitu Permandian Matakidi dan Danau Napabale, selebihnya 86% dalam kategori sedang (Tabel 2).

Tabel 2. Klasifikasi Potensi Gabungan Objek Wisata di Pulau Muna

| Internal | Jenis Klasifikasi Potensi | | | | | | Potensi Gabungan | |
|---------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|-------------|------------------|--------|
| | Internal Skor | Internal Kelas | Eksternal Skor | Eksternal Kelas | Fisik Skor | Fisik Kelas | Skor | Kelas |
| Permandian Matakidi | 6 | Rendah | 18 | Sedang | 8 | Tinggi | 32 | Sedang |
| Permandian Wakante | 7 | Sedang | 20 | Tinggi | 7 | Sedang | 34 | Sedang |
| Pulau Indo | 9 | Sedang | 20 | Tinggi | 6 | Sedang | 36 | Sedang |
| Pulau Pajala | 7 | Sedang | 18 | Sedang | 7 | Sedang | 32 | Sedang |
| Pulau Gala Kecil | 7 | Sedang | 16 | Rendah | 6 | Sedang | 29 | Rendah |
| Puncak Wakila | 9 | Sedang | 21 | Tinggi | 5 | Sedang | 35 | Sedang |
| Danau Napabale | 10 | Tinggi | 21 | Tinggi | 8 | Tinggi | 39 | Sedang |
| Pantai Meleura | 10 | Tinggi | 21 | Tinggi | 5 | Sedang | 36 | Sedang |
| Pulau Towea | 7 | Sedang | 18 | Sedang | 6 | Sedang | 31 | Sedang |
| Pantai Walengkabola | 7 | Sedang | 19 | Sedang | 7 | Sedang | 33 | Sedang |
| Pantai Mutiara | 10 | Tinggi | 18 | Sedang | 5 | Sedang | 33 | Sedang |
| Pantai Wantopi | 6 | Rendah | 19 | Sedang | 6 | Sedang | 31 | Sedang |
| Pantai Katembe | 8 | Sedang | 22 | tinggi | 7 | Sedang | 37 | Sedang |
| Permandian Maobu | 7 | sedang | 18 | Sedang | 5 | Sedang | 30 | Sedang |

Hasil penilaian tersebut kemudian diperoleh tiga kelas potensi pengembangan yaitu:

- Kelas potensi tinggi nilai total skor objek wisata >40
- Kelas potensi sedang nilai total skor objek wisata 30-40
- Kelas potensi rendah nilai total skor objek wisata <30

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat dua belas objek wisata yang mempunyai nilai klasifikasi sedang dan satu objek wisata yang mempunyai klasifikasi rendah. Klasifikasi rendah berada pada objek wisata Pulau Gala Kecil, sedangkan tiga belas objek wisata lainnya termasuk dalam klasifikasi potensi sedang yaitu Permandian Matakidi, Permandian Wakante, Pulau Indo, Pantai Pajala, Puncak Wakila, Danau Napabale, Pantai Meleura, Pulau Towea, Pantai Walengkabola, Pantai Mutiara, Pantai Wantopi, Pantai Katembe, dan Permandian Maabu (Tabel 2).

4.3. Arah kebijakan pengembangan wisata

Dokumen kebijakan perencanaan pembangunan yang dikaji dengan pendekatan analisis konten terhadap Perda RTRW Kabupaten Muna, sedangkan Perda RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara digunakan sebagai acuan untuk Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Buton Tengah sebagai daerah otonomi baru yang belum mensahkan Peraturan Daerah tentang RTRW. Hasil penelusuran konten dari kedua Perda RTRW tersebut, dihasilkan beberapa *entry point* penting terkait dengan rencana pengembangan wisata.

1. Tujuan penataan ruang baik di Kabupaten Muna dan Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki tujuan mewujudkan pengelolaan perikanan dan kelautan yang berintegrasi dengan pengembangan pariwisata berbasis wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil.
2. Strategi pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Muna dan Provinsi Sulawesi Tenggara memfokuskan pada upaya pengembangan sector kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil pada pengembangan ekowisata.
3. Rencana pola ruang di Kabupaten Muna telah mengakomodir dua objek wisata unggulan yaitu Pantai Pasir Putih Walengkabola dan Danau Napabale.
4. Rencana struktur ruang di Kabupaten Muna menenpatkan Kecamatan Loghia dan Towea sebagai PPL yang memberikan peluang objek wisata disekitarnya untuk lebih mudah diakses.

Secara umum perencanaan objek daya tarik wisata di kawasan kajian telah menunjukkan peluang pengembangan yang akan mengarah kepada pengembangan objek wisata berbasis ekowisata. Namun diharapkan Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Buton Tengah sebagai bagian dari pengembangan wisata di Pulau Muna perlu mengarahkan kebijakan pengembangan pariwisata bahari dan pulau pulau kecil pada sub sektor ekowisata. Sehingga diharapkan pengelolaan wisata di Pulau Muna secara terpadu dapat mengangkat brand Pulau Ekowisata.

5. Simpulan

Kebijakan pengembangan wisata di Pulau Muna telah diarahkan pada RTRW Kabupaten Muna dan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pengembangan ekowisata. Potensi wisata terbagi menjadi kategori rendah dan sedang. Klasifikasi rendah berada pada objek wisata Pulau Gala Kecil, sedangkan tiga belas objek wisata lainnya termasuk dalam klasifikasi potensi sedang. Urgensi pengembangan objek wisata di Pulau Muna perlu mengedepankan konsep pengembangan ekowisata berbasis pesisir dan pulau pulau kecil dengan melakukan percepatan pengelolaan objek wisata yang termasuk dalam kategori sedang.

6. Ucapan Terima Kasih

Apresiasi dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ketua Pusat Studi Tata Lingkungan dan Kependudukan UIN Alauddin Makassar dan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang berkenan memfasilitasi penelitian ini. Terimakasih kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara dan SKPD terkait lainnya yang telah membantu penulis selama melaksanakan kegiatan penelitian terutama dalam proses pengumpulan data.

7. Referensi

- Abdillah, D. 2016. Pengembangan wisata bahari di Pesisir Pantai Teluk Lampung. *Jurnal Destinasi Kepariwisata Indonesia*, 45-65. [\(cantumkan volume\)](#)
- Ahmad, J. 2018. *Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)*. Retrieved from researchgate.com: https://www.researchgate.net/profile/Jumaal_Ahmad/publication/325965331_Desain_Penelitian_Analisis_Isi_Content_Analysis/links/5b305090a6fdcc8506cb8b21/Desain-Penelitian-Analisis-Isi-Content-Analysis.pdf
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. [?? p.](#)
- BPS. 2018. *Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Angka Tahun 2018*. Badan Pusat Statistik. Kendari. [?? p.](#)
- Dias, S. 2009. Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Kabupaten Malang. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 27-47.
- Hidayat, M. 2011. Strategi Perencanaan dan Pengembangan Objek Wisata. *Tourism and Hospitality Essentials (THE) Journal*, 33-43.
- Hidayat, M. 2011. Strategi Perencanaan dan Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat). *Tourism and Hospitality Essentials (THE) Journal*, 33-44.
- Ismawati, L., Anggani, S. D., & Narimati, U. 2011. *Penulisan Karya Ilmiah*. Genesis. Bandung. [?? p.](#)
- Kusriyaningsih, T. 2016. *Perencanaan Pembangunan Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*. Malang: Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. [?? p.](#)
- Lase, E., Sihombing, M., & Tamrin, H. 2018. Analisis Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata di Kabupaten Nias. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal Of Social and Cultural Anthropology)*, 126-138.
- Lokantara, I. W., & Rafii, M. 2017. Identifikasi Tipologi Destinasi Wisata dan Strategi Pengembangannya sebagai Upaya Mewujudkan Pariwisata Kabupaten Karangasem Berbasis Wisata Konservasi. *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers UNISBANK Ke 3*. Universitas Stikubank Semarang. Semarang. 352-361 pp.
- Putra, A. M. 2008. Identitas dan Komodifikasi Budaya dalam Pariwisata Budaya Bali. *Analisis Pariwisata*, 7. [?-?](#)
- Rustiadi, E. 2001. *Pengembangan Wilayah Pesisir sebagai Kawasan Strategis Pembangunan Daerah*. Pelatihan Pengelolaan dan Perencanaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu (ICZM). Jakarta. [?? p.](#)
- Suardana, I. W. 2011. Dekonstruksi Kebijakan Pembangunan Pariwisata yang Berkelanjutan di Bali. *Analisis PARIWISATA*, 16. [?-?](#)
- Sunarwan. 2012. *Analisis Potensi Obyek Wisata Grojogansewu terhadap Pengembangan Wisara di Kecamatan Tawasangmangu Kabupaten Karanganyar*. Universitas

- Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. ?? p.
- Utami, B. Y. 2016. *Pariwisata dan Pengembangan Wilayah di Kawasan Selatan Pulau Lombok*. Sekolah Pascasarjana Instut Pertanian Bogor. Bogor. ?? p.
- Yotie, A. O. 2008. *Perencanaan dan Pengembanagn Pariwisata*. PT.Pradnya Paramita. Jakarta. ?? p.

Fadhil Surur, Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar, Email : fadhil.surur@uin-alauddin.ac.id
URL ID-orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2364-4709>
URL Google Scholer: <https://scholar.google.co.id/citations?user=JCyC8dAAAAAJ&hl=en&oi=ao>
URL Sinta Dikti: <http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=5998665&view=overview>
Zulhinas Nyilam Cahya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
Malikuddin Surgani Wahid, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan

How to cite this article:

F. Surur, Z. N. Cahya, & M. S. Wahid. 2019. The urgency of tourism development in the planning of Muna island region, Southeast Sulawesi. *Akuatikisle: Jurnal Akuakultur, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil* 3(2):41-47. <https://doi.org/10.29239/j.akuatikisle.3.2.41-47>.
